

ABSTRAK

Bayu Mahendra : Penerapan Presidential Threshold Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan juga menerapkan sistem kepartaian yang multipartai, sistem multipartai cenderung menitik beratkan kekuasaan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah, kombinasi sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial adalah berbahaya *inimical* untuk stabilitas demokrasi, diterapkannya Presidential Threshold merupakan ambang batas jumlah suara atau kursi yang harus dicapai oleh kandidat calon presiden atau partai politik untuk memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Presidential Threshold terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, serta apa yang menjadi kendala dalam penerapan presidential threshold terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan presidential threshold terhadap sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran), dengan metode pendekatan ini pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini dengan adanya Presidential Threshold dapat membentuk koalisi partai dominan didalam parlemen untuk memperlancar pengambilan keputusan dengan Presiden, namun perlu adanya suatu reformulasi yang disesuaikan dengan terpenuhinya hak partai politik, salah satunya dengan penurunan angka Presidensial Threshold dalam parameter yang menjamin setiap partai politik dapat ikut serta kontestasi pemilu Presiden.

Kata kunci : Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Penguatan Sistem Presidensial.